

JURGEN HABERMAS: TEORI KRITIS DENGAN PARADIGMA KOMUNIKASI

Oleh: Ajat Sudrajat
Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY

A. Pendahuluan

Jurgen Habermas adalah salah seorang tokoh dari Filsafat Kritis. Ciri khas dari filsafat kritisnya adalah, bahwa ia selalu berkaitan erat dengan kritik terhadap hubungan-hubungan sosial yang nyata. Pemikiran kritis merefleksikan masyarakat serta dirinya sendiri dalam konteks dialektika struktur-struktur penindasan dan emansipasi. Filsafat ini tidak mengisolasi diri dalam menara gading teori murni. Pemikiran kritis merasa diri bertanggung jawab terhadap keadaan sosial yang nyata¹.

Aliran pemikiran kritis ini mulai berkembang sekitar tahun dua puluhan. Tokoh-tokohnya antara lain Georg Lukacs, Karl Korsch, Ernst Bloch, Antonio Gramsci dan seterusnya. Salah satu aliran dalam pemikiran kritis adalah Teori Kritis Masyarakat. Teori Kritis ini dikembangkan sejak tahun 30-an oleh tokoh-tokoh yang semula bekerja di Institut für Sozialforschung pada Universitas Frankfurt. Mereka itu adalah Marx Horkheimer, Theodor W. Adorno dan Herbert Marcuse serta anggota-anggota lainnya. Kelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan “Mazhab Frankfurt”².

Jurgen Habermas adalah pewaris dan pembaharu Teori Kritis. Meskipun ia sendiri tidak lagi dapat dikatakan termasuk Mazhab Frankfurt, arah penelitian Habermas justru membuat subur gaya pemikiran “Frankfurt” itu bagi filsafat dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Uraian singkat ini akan mencoba menelusuri perkembangan pemikirannya.

B. Perkembangan Pemikiran J. Habermas

Titik tolak pemikiran J. Habermas adalah pada paham Horkheimer dan Adorno di atas. Dalam pemikiran Habermas, Teori Kritis dirumuskan sebagai sebuah “filsafat empiris sejarah dengan maksud praktis”. Empiris dan ilmiah, tetapi tidak dikembalikan kepada ilmu-ilmu empiris-analitis; filsafat di sini berarti refleksi kritis bukan dalam arti

¹Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hal. 176.

²*Ibid.*, hal. 177.

menetapkan prinsip-prinsip dasar; historis tanpa jatuh ke dalam historisistik; kemudian praktis, dalam arti terarah pada tindakan politis emansipatoris”³.

1. Ilmu dan Kebebasan Nilai

Masalah pokok yang menjadi persoalan adalah apakah ilmu-ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu sosial, harus bekerja dengan bebas nilai. Para pendukung kebebasan nilai memberi jawaban afirmatif, bahkan mereka menambahkan bahwa metode yang dipakai dalam ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial tidak berbeda. Artinya kalau ilmu-ilmu sosial mau berlaku sebagai ilmu pengetahuan harus menghasilkan hukum-hukum umum dan prediksi-prediksi ilmiah seperti dalam ilmu-ilmu alam. Dan penjelasan ilmiah tidak memihak dan tidak memberi penilaian apapun. Atas dasar pendapat ini, para pendukung kebebasan nilai dimasukkan dalam kubu positivisme.

Menurut Habermas setiap penelitian ilmiah diarahkan oleh kepentingan-kepentingan vital umat manusia (baik dalam ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial). Oleh karena itu postulat tentang kebebasan nilai merupakan ‘ilusi’ tidak hanya bagi ilmu-ilmu sosial, melainkan juga bagi ilmu-ilmu alam. Melepaskan nilai-nilai dari fakta-fakta sama artinya dengan mempertentangan *Sein* (Ada) yang murni dengan *Sollen* (seharusnya) yang abstrak⁴.

Di dalam pengertian mengenai kepentingan dan mengarahkan pengetahuan tercakup dua momen: pengetahuan dan kepentingan. Dari pengalaman sehari-hari diketahui, bahwa ide-ide seringkali berfungsi memberikan arah kepada tindakan-tindakan. Atau ide-ide merupakan motif pembenaran atas tindakan. Apa yang pada tingkat tertentu disebut *rasionalisasi*, pada tingkat kolektif dinamakan *ideologi*⁵.

Di dalam bagian akhir esainya tentang *Dogmatism, Reason and Decision*, Habermas mengemukakan bahwa ‘hanya rasio yang sepenuhnya sadar akan kepentingan dalam kemajuan refleksi ke arah otonomi dan tanggungjawab, yang tak henti-hentinya berpikir dalam setiap diskusi rasional, akan mampu meraih kekuatan transenden dari kesadaran akan keterlibatan-keterlibatan materialistisnya sendiri. Yang dimaksud di sini

³Thomas McCarthy, *Communication and The Evolution of Society*, London: Heinemann, 1979. Lihat juga FX. Mudji Sutrisno dan F. Budi Hardiman (ed.), *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hal. 147.

⁴Jurgen Habermas, *Ilmu Dan Teknologi Sebagai Ideologi*, Jakarta: LP3ES, 1990, hal. 158.

⁵*Ibid.*, hal 171.

adalah rasio yang melakukan refleksi-diri (kritis) dengan didorong oleh kepentingan untuk membebaskan diri dari kendala-kendala dari luar maupun dari dalam subjek pengetahuan, yaitu kepentingan emansipatoris⁶.

Habermas lebih lanjut membedakan empat taraf rasionalisasi. *Pertama*, rasionalisasi membuka kemungkinan aplikasi metodologi ilmu-ilmu empiris dalam tingkah laku rasional untuk mewujudkan sasaran-sasaran. *Kedua*, rasionalisasi mencakup pilihan pilihan atas teknik-teknik untuk penerapan. Pertimbangan-pertimbangan teknis diterjemahkan ke dalam praksis, yaitu teknologi dan industri sistem sosial. Dalam kedua taraf ini, nilai-nilai normatif disingkirkan sebagai irrasional, tetapi untuk mengadakan pilihan teknik yang sesuai dengan rasionalitas teknologis, diperlukan teori keputusan dan di sini ada nilai implisit, yaitu: 'ekonomis' dan 'efisiensi'. *Ketiga*, rasionalisasi sebagai usaha-usaha untuk memenangkan kontrol atas proses-proses tertentu dengan prediksi ilmiah. Pada taraf ketiga ini, menurut Habermas, nilai-nilai bukannya disingkirkan, melainkan justru ditetapkan. *Keempat*, rasionalisasi mencakup penerjemahan pengambilan keputusan ke dalam mesin. Mesin akan melakukan rutinisasi keputusan atas dasar nilai-nilai seperti: efisiensi, efektivitas, produktivitas dan seterusnya⁷.

2. Masyarakat, Sejarah dan Paradigma Komunikasi

Perkembangan filsafat sosial sejak Marx sudah disibukkan dengan usaha mempertautkan teori dan praksis. Masalahnya adalah bagaimana pengetahuan tentang masyarakat dan sejarah bukan hanya sebuah kontemplasi, melainkan mendorong 'praxis perubahan sosial'. Praxis ini bukanlah tingkah laku buta atas naluri belaka, melainkan tindakan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian praksis diterangi oleh 'kesadaran rasional', karenanya bersifat emansipatoris.

Habermas dalam esainya, *Labor and Interaction: Remarks on Hegel's Jena 'Philosophy of Mind'*, mengatakan bahwa Hegel memahami praksis bukan hanya sebagai 'kerja', melainkan juga 'komunikasi'. Karena praksis dilandasi kesadaran rasional, rasio tidak hanya tampak dalam kegiatan menaklukkan alam dengan kerja, melainkan juga dalam 'interaksi intersubjektif' dengan bahasa sehari-hari. Jadi seperti halnya kerja membuat orang berdistansi dari alamnya, bahasa memungkinkan distansi dari persepsi

⁶F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hal. 34.

⁷*Ibid.*, hal. 32.

langsung, sehingga baik kerja maupun bahasa berhubungan tidak hanya dengan praksis, tetapi juga dengan rasionalitas⁸.

Habermas memperlihatkan kelemahan para pendahulunya, karena tidak hanya mengandaikan praksis sebagai kerja, yang disebutnya '*tindakan rasional bertujuan*', melainkan juga rasionalisi sebagai 'penaklukan, kekuasaan, atau apa yang disebutnya '*rasio yang berpusat pada subjek*'. Modernisasi kapitalis berjalan timpang karena mengutamakan rasionalisasi dalam bidang subsistem-subsistem tindakan rasional-bertujuan, dan mengesampingkan rasionalisasi di bidang kerangka-kerja institusional atau komunikasi. *Rasionalisasi praksis komunikasi* ini adalah dasar khas teori sosial Habermas⁹.

Habermas menerima asumsi Marx bahwa sejarah berjalan menurut logika perkembangan tertentu, hanya ia tidak setuju bahwa teknologi dan ekonomi menjadi motor perkembangan sejarah. Apa yang oleh Marx disebut cara produksi masyarakat, menurutnya justru dimungkinkan oleh proses belajar dimensi praktis-moral masyarakat itu, yakni prinsip-prinsip organisasinya. Jadi, kapitalisme adalah sebuah kasus dalam evolusi sosial; dan dalam kasus itu, prinsip organisasi kapitalis memungkinkan ekonomi dan teknologi mengatur interaksi sosial. Karena kapitalisme hanyalah sebuah kasus, peranan teknologi dan ekonomi tidak bisa diuniversalkan untuk segala zaman dan segala bentuk formasi sosial.

Dengan asumsi bahwa masyarakat pada hakekatnya bersifat komunikatif, Habermas kemudian mengganti paradigma produksi dari materialisme sejarah itu dengan paradigma komunikasi. Jadi sebagai ganti peranan cara-cara produksi, ia mengutamakan peranan struktur-struktur komunikasi sosial dalam perubahan masyarakat¹⁰. Struktur-struktur komunikasi ini, menurut Habermas lebih hakiki untuk masyarakat daripada cara-cara produksi, sebab cara-cara produksi yang juga melibatkan proses belajar berdimensi teknis itu diatur oleh struktur-struktur komunikasi.

Rasionalisasi kekuasaan pada gilirannya mengangkat isu demokrasi dalam arti bentuk-bentuk komunikasi umum dan publik yang bebas dan terjamin secara

⁸*Ibid.*, hal., xx.

⁹*Ibid.*, hal. 97.

¹⁰*Ibid.*, hal., 116.

institusional. Dalam pandangan Habermas, hanya kekuasaan yang ditentukan oleh diskusi publik yang kritis merupakan kekuasaan yang dirasionalisasikan. Dalam politik modern hanya model 'pragmatis'lah yang berkaitan dengan demokrasi. Dalam model pragmatis ini, pemisahan ketat fungsi tenaga ahli dan politikus diganti dengan 'interaksi kritis'. Model ini memungkinkan adanya komunikasi timbal balik di antara para ahli dan para politikus, yang pada gilirannya memungkinkan para ahli itu memberikan nasihat ilmiah untuk para pengambil keputusan, dan para politikus berbincang dengan para ilmuwan menurut kebutuhan-kebutuhan praktis. Komunikasi macam ini dilukiskan sebagai komunikasi yang tidak didasari atas legitimasi kekuasaan ideologis, melainkan sebuah diskusi informatif ilmiah. Unsur interaksi kritis dalam politik inilah yang dilihat Habermas sebagai kemungkinan nyata bagi rasionalisasi kekuasaan dalam masyarakat dewasa ini¹¹. Rasionalisasi yang demikian disebutnya dengan rasionalisasi praktis-etis, yang dalam pengertian klasiknya --dalam pikiran Aristoteles-- politik berhubungan dengan etika: ajaran tentang hidup yang baik dan adil dalam 'polis' atau masyarakat¹².

3. Alternatif Habermas: Rasio Komunikatif dan Pencerahan.

Habermas berpendapat bahwa kritik hanya akan maju dengan landasan '*rasio komunikatif*' yang dimengerti sebagai '*praksis komunikasi* atau *tindakan komunikatif*'. Ditegaskan olehnya, bahwa masyarakat pada hakekatnya komunikatif dan yang menentukan perubahan sosial bukanlah semata-mata perkembangan kekuatan-kekuatan produksi atau teknologi, melainkan 'proses belajar' dalam dimensi praktis-etis'..

Dalam *rasio komunikatif*, 'sikap mengobjektifkan yang membuat subjek pengetahuan memandang dirinya sebagai entitas-entitas di dunia luar tidak lagi istimewa'. Hubungan ambivalen subjek kepada dirinya (memandang diri sebagai subjektivitas yang bebas sekaligus objektifikasi diri yang memperbudak) dihancurkan oleh intersubjektivitas. Rasio tersebut tidak berasimilasi dengan kekuasaan. Singkatnya, rasio yang berpusat pada subyek, termasuk pencampuradukan (*amalgama*) pengetahuan dan kekuasaan, dapat dihancurkan dengan intersubjektivitas rasio komunikatif¹³.

¹¹ *Ibid.*, hal. 128.

¹² *Ibid.*, hal., 134.

¹³ *Ibid.*, hal. 229.

Atas dasar paradigma baru itu, Habermas ingin mempertahankan isi normatif yang terdapat dalam modernitas dan pencerahan kultural. Isi normatif modernitas adalah apa yang disebutnya rasionalisasi *dunia-kehidupan* dengan dasar rasio komunikatif. Dunia kehidupan terdiri dari *kebudayaan, masyarakat dan kepribadian*. Rasionalisasi dunia-kehidupan ini dimungkinkan lewat tindakan komunikatif¹⁴.

Rasionalisasi akan menghasilkan tiga segi. Pertama, reproduksi kultural yang menjamin bahwa dalam situasi-situasi baru yang muncul, tetap ada kelangsungan tradisi dan koherensi pengetahuan yang memadai untuk kebutuhan konsensus dalam praktek sehari-hari. Kedua, integrasi sosial yang menjamin bahwa dalam situasi-situasi yang baru, koordinasi tindakan tetap terpelihara dengan sarana hubungan antarpribadi yang diatur secara legitim dan kekonstanan identitas-identitas kelompok tetap ada. Ketiga, sosialisasi yang menjamin bahwa dalam situasi-situasi baru, perolehan kemampuan umum untuk bertindak bagi generasi mendatang tetap terjamin dan penyelarasan sejarah hidup individu dan bentuk kehidupan kolektif tetap terpelihara¹⁵. Ketiga segi ini memastikan bahwa situasi-situasi baru dapat dihubungkan dengan apa yang ada di dunia ini melalui tindakan komunikatif.

Di dalam komunikasi itu, para partisan melakukan komunikasi yang memuaskan. Para partisan ingin membuat lawan bicaranya memahami maksudnya dengan berusaha mencapai apa yang disebutnya 'klaim-klaim kesahihan' (*validity of claims*). Klaim-klaim inilah yang dipandang rasional dan akan diterima tanpa paksaan sebagai 'hasil konsensus'.

Dalam bukunya *The Theory of Communicative Action*, Habermas menyebut empat macam klaim. Kalau ada kesepakatan tentang dunia alamiah dan objektif, berarti mencapai 'klaim kebenaran' (*truth*). Kalau ada kesepakatan tentang pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial, berarti mencapai 'klaim ketepatan' (*rightness*). Kalau ada kesepakatan tentang kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang, berarti mencapai 'klaim autentisitas atau kejujuran' (*sincerity*). Akhirnya, kalau mencapai kesepakatan atas klaim-klaim di atas secara keseluruhan, berarti mencapai 'klaim

¹⁴Gerben Heitink, *Practical Theology: History, Theory, Action Domains*, Michigan, William B. Eerdmans Publishing Company, , hal. 136-137.

¹⁵F. Budi Hardiman., *Menuju ...* hal. 230.

komprehensibilitas' (*comprehensibility*). Setiap komunikasi yang efektif harus mencapai klaim keempat ini, dan mereka yang mampu melakukannya disebut memiliki 'kompetensi komunikatif'¹⁶.

Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik lewat revolusi dengan kekerasan, akan tetapi dengan memberikan argumentasi. Habermas lalu membedakan dua macam argumentasi: perbincangan atau diskursus (*discourse*) dan kritik. Dilakukan perbincangan jika mengandaikan kemungkinan untuk mencapai konsensus. Meskipun dimaksudkan untuk konsensus, komunikasi juga bisa terganggu, sehingga tak perlu mengandaikan konsensus. Dalam hal ini Habermas mengedepankan kritik. Bentuk kritik itu dibaginya menjadi dua: kritik *estetis* dan kritik *terapeutis*. Kritik estetis, kalau yang dipersoalkan adalah norma-norma sosial yang dianggap objektif. Kalau diskursus praktis mengandaikan objektivitas norma-norma, kritik dalam arti ini adalah mempersoalkan kesesuaiannya dengan penghayatan dunia batiniah. Sedang kritik terapeutis adalah kalau itu dimaksudkan untuk menyingkapkan penipuan-diri masing-masing pihak yang berkomunikasi¹⁷.

C. Penutup

Dari urian singkat di atas, nyatalah bahwa paradigma komunikasi menempati pusat pemikiran Habermas dalam usahanya melakukan perubahan sosial. Dalam bahasanya Kant, komunikasi merupakan imperatif kategoris yang meminggirkan sentralitas subyek. Karena paradigma komunikasi dengan sendirinya berarti mengedepankan adanya hubungan intersubjektif.

¹⁶ *Ibid.*, hal., xxii. Lihat Juga Gerben Heitink, *Practical...*, hal. 135.

¹⁷ *Ibid.*